

**Judul** : Terus dukung proses pembelajaran, optimalkan beasiswa bagi warga terdampak bencana  
**Tanggal** : Rabu, 07 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

Terus Dukung Proses Pembelajaran

## Optimalkan Beasiswa Bagi Warga Terdampak Bencana

Pemerintah diusulkan mengoptimalkan beasiswa bagi pelajar terdampak bencana di Sumatera.

Usulan itu datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati. Usulan ini disambut baik. Meskipun di sisi lain, usulan ini juga mendapatkan catatan, yakni realisasi yang dibayangi persoalan ketersediaan anggaran dan akurasi data.

Kurniasih menjelaskan, negara diminta memberikan keberpihakan nyata bagi keberlanjutan pendidikan anak-anak sekolah dan mahasiswa yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Menurut dia, langkah ini krusial dilakukan oleh Pemerintah.

"Mengingat bencana sering kali melumpuhkan kondisi ekonomi keluarga sehingga meningkatkan risiko putus sekolah," ujar Kurniasih, Senin

(5/1/2025).

Dia menambahkan, negara harus memastikan anak-anak tetap bersekolah dan mahasiswa dapat melanjutkan studinya melalui beasiswa. "Melalui optimalisasi PIP, KIP Kuliah, bantuan UKT dan berbagai beasiswa pendidikan lainnya," ujar Kurniasih.

Sedangkan, Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung mengingatkan, supaya kebijakan optimalisasi beasiswa tersebut tidak mengganggu alokasi rutin pendidikan yang jumlahnya sudah sangat terbatas di kementerian. Sebab, kata dia, pagu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu sangat kecil dari total anggaran fungsi pendidikan.

"Tangan sampai usulan Komisi X DPR ini justru mengganggu anggaran yang

sudah ada, sementara di lapangan masih banyak sekolah yang bahkan belum tersentuh bantuan sama sekali," ujar Fahriza kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (6/1/2026).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, ada sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana. Dari sejumlah itu, 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembarisan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat.

Untuk mendukung proses pembelajaran di daerah terdampak bencana tersebut, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. Kebijakan ini menjadi acuan nasional bagi Pemerintah

Daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di tengah situasi darurat akibat bencana alam.

Surat Edaran tersebut menyebutkan, satuan pendidikan diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai kondisi dan tingkat dampak bencana. Penyesuaian dapat dilakukan terhadap metode pembelajaran, waktu pelaksanaan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia.

Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan berbagai alternatif pembelajaran. Termasuk pembelajaran tetap muka terbatas, pembelajaran jarak jauh, maupun bentuk pembelajaran lain yang relevan dengan kondisi setempat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menjelaskan,

kebijakan ini merupakan bentuk hadinya negara dalam situasi krisis. Menurut dia, pendidikan harus tetap berjalan meskipun bencana terjadi, selama keselamatan seluruh warga satuan pendidikan tetap menjadi pertimbangan utama.

"Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana. Namun, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil," ujar Abdul Mu'ti dikutip dari laman *pustabidk.kemendikdasmen.go.id*, Selasa (6/1/2026).

Untuk mengetahui pandangan Kurniasih Mufidayati dan Fahriza Marta Tanjung mengenai usulan optimalisasi beasiswa untuk siswa dan mahasiswa terdampak bencana Sumatera, berikut wawancaranya.

KURNIASIH MUFIDAYATI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI

FAHRIZA MARTA TANJUNG, Ketua Umum FSGI

### Kebijakan Bantuan Jangan Sampai Kaku

### Usulan Tidak Boleh Mengganggu Anggaran



“

Saya mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta lembaga filantropi untuk berkolaborasi dalam menyediakan beasiswa berkelanjutan.

“

Perbaiki sistem pendataannya; jangan hanya mengandalkan link masuk, tapi harus berdasarkan hasil survei nyata di sekolah-sekolah yang terdampak.



**Apa alasan Anda mengusulkan optimalisasi beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang terdampak bencana Sumatera saat ini?**

Bencana alam kerap berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga, sehingga meningkatkan risiko putus sekolah maupun terhentinya studi di jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu, dukungan negara melalui kebijakan afirmatif di bidang pendidikan menjadi sangat krusial.

**Apa saja bentuk bantuan yang Anda dorong agar dioptimalkan oleh pemerintah?**

Salah satu langkah yang terus didorong adalah optimalisasi alokasi Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, bantuan UKT serta berbagai skema beasiswa lainnya selama masa pemulihan hingga beberapa waktu ke depan.

**Terkait mekanisme penyaluran, apa permintaan Anda kepada kementerian terkait?**

Kami mendorong Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan pendataan yang akurat dan responsif. Kami meminta agar kebijakan bantuan pendidikan tidak kaku secara administratif. Mekanisme penyaluran harus adaptif dan cepat sesuai kondisi lapangan.

**Selain Pemerintah Pusat, siapa lagi yang seharusnya terlibat dalam kolaborasi bantuan ini?**

Saya mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta lembaga filantropi untuk berkolaborasi dalam menyediakan beasiswa berkelanjutan.

**Jadi perlu langkah kolaboratif ya?**

Kolaborasi lintas sektor penting agar dukungan tidak bersifat sementara, tetapi mampu menopang proses pemulihan jangka menengah dan panjang.

**Apa dampak yang diharapkan jika akses pendidikan ini tetap terjaga di wilayah terdampak bencana?**

Menjaga akses pendidikan meru-

pakan bagian dari strategi pemulihan sumber daya manusia. Pendidikan yang terjangkau akan membantu anak-anak dan mahasiswa bangkit dari trauma, menjaga harapan, serta mempersiapkan mereka menjadi generasi yang tangguh.

**Jadi pemulihan pendidikan juga harus menjadi bagian penting dalam pemulihan pasca bencana ya?**

Pemulihan pascabencana tidak hanya membangun kembali fisik dan infrastruktur, tetapi juga memastikan kualitas sumber daya manusia tetap terjaga. Pendidikan adalah kunci agar anak-anak dan mahasiswa di Sumatera tetap memiliki masa depan yang lebih baik.

**Apa target utama yang ingin dicapai melalui pengawalan kebijakan beasiswa ini?**

Intinya adalah keberpihakan negara dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi mereka yang terdampak. Negara harus hadir memastikan tidak ada hak pendidikan yang terabaikan akibat bencana alam yang terjadi. ■ NNM

**Anggota Komisi X DPR mendorong beasiswa khusus untuk mahasiswa dan siswa korban bencana di Sumatera. Bagaimana kondisi orang tua siswa di lapangan saat ini?**

Apa yang disampaikan Komisi X memang sesuai realita. Banyak orang tua yang belum bisa kembali bekerja karena rumahnya hilang atau rusak. Fokus mereka belum pada mencari penghasilan tetap. Jadi, memang benar bahwa beban biaya pendidikan anak-anak mereka harus menjadi perhatian. Namun, jangan anggarannya tersedia tanpa memotong pos lain yang sudah berjalan.

**Apa yang menjadi kekhawatiran Anda?**

Sebagaimana kita ketahui, dari total anggaran fungsi pendidikan yang mencapai sekitar Rp 700 triliun, pagu untuk Kemendikdasmen itu hanya sekitar Rp 90 triliun. Jumlah ini sangat kecil. Kalau ada usulan beasiswa baru, saya khawatir akan mengganggu anggaran rutin yang sudah ada di kementerian. Komisi X sebagai mitra harus menyelesaikan usulan ini dengan kapasitas finansial kementerian.

**Untuk merealisasikan usulan ini, masalah apa yang harus diperhatikan?**

Untuk urusan pendataan sekolah terdampak saja masih berantakan. Kadang Pemerintah Daerah buat data, UPT Kementerian buat, lalu pihak lain juga buat menggunakan berbagai *link*. Akibatnya sekolah bingung, dan pada akhirnya pendataan resmi justru terabaikan atau tidak diisi. Ini kejadian nyata di lapangan.

**Apakah ada contoh kasus sekolah yang terabaikan karena masalah pendataan ini?**

Di Medan misalnya, ada sekolah yang lebih dari sebulan belum tersentuh bantuan materi maupun peralatan sama sekali dari kementerian, padahal programnya ada. Ini karena mereka tidak terdata. Pendataan yang tidak maksimal ini menjadi PR besar jika ingin menyalurkan beasiswa tepat sasaran.

**Bagaimana dengan kesiapan sekolah dalam memulai kembali kegiatan belajar mengajar pascabencana?**

Rencana pembukaan sekolah tunggal

5 Januari kemarin ternyata masih terkendala. Banyak sekolah yang belum dibersihkan dari lumpur. Di daerah Tapaneli Tengah, Aceh Tamiang, hingga Aceh Tengah, aksesnya terputus. Data mengenai kondisi sekolah-sekolah ini pun belum maksimal masuk ke pusat.

**Artinya, pemberian beasiswa ini harus memperhatikan tingkat kerusakan yang dialami setiap siswa?**

Tingkat kehilangan atau kerusakan yang dialami keluarga siswa dan mahasiswa itu berbeda-beda. Hal ini yang perlu diperhatikan secara detail agar bantuan bisa benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang sangat membutuhkan.

**Apa harapan Anda kepada Komisi X DPR dan Pemerintah terkait rencana kebijakan ini?**

Usulannya harus tepat sasaran. Dan yang terpenting, perbaiki sistem pendataannya; jangan hanya mengandalkan *link* masuk, tapi harus berdasarkan hasil survei nyata di sekolah-sekolah yang terdampak. ■ NNM